

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan perencanaan kegiatan perangkat daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Renstra dan RPJMD. Adapun penyusunan Renja perangkat daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini diharapkan benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 9 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN



ACHMAD HARYONO, S.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680305 199310 1 001



DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 :	
BAB I PENDAHULUAN	I-1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah, dalam bentuk kerangka kegiatan dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rancangan Awal sekaligus menyempurnakan rancangan awal renja perangkat daerah yang sudah ada.



Rencana Kerja Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan tahun 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Disamping itu Rencana Kerja Perangkat daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2005 Pasal 5 ayat (1) dan (2). Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2024 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertujuan untuk memantapkan dan sebagai pedoman terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi serta untuk memberikan gambaran arah kebijakan, sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan. Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan. Rencana Kerja Tahun 2024 juga dirumus untuk mensinkron dalam rangka menunjang visi, misi kepala daerah pada Tahun 2024 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 71 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan.

Tugas Pokok :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Fungsi :

Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini adalah :



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18



- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;



20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi



- Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031
36. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan 2021-2026;
38. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.
39. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan.



1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2024 untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang



sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun



kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja Tahun 2024 dan pendanaan Tahun 2024 berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Hasil capaian kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Tujuan Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan adalah ***“Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa”*** dengan indikator tujuan Indeks Desa Membangun (IDM) dimana ditargetkan pada Tahun 2022 sebesar Kinerja sangat tinggi (0,68%) dan ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”*** dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana ditargetkan pada akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah B dan Nilai evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana ditargetkan pada akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah B.

Pada tahun 2022 realisasi indikator tujuan Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,69%, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi indeks IKM Triwulan IV Tahun 2022 adalah 85,921 (Kategori B), dan realisasi indikator Nilai evaluasi SAKIP terealisasi sebesar 66,18 (Kategori B) hal



tersebut menunjukkan bahwa tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercapai. Namun demikian perbaikan dalam perumusan indikator kinerja masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Grobogan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 (periode Renstra SKPD)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026 (periode Renstra SKPD)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik 2. Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah 3. Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko	7.078.738.742	7.412.298.300	7.412.298.300	7.323.284.844	98,80	7.323.284.844	22.058.867.988	3,12
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	23.846.889	24.020.000	24.020.000	24.020.000	100,00	24.020.000	72.060.000	3,02
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta penyelesaian Indikator Desa Membangun (IDM) dan	5.120.676.566	4.981.174.000	4.981.174.000	4.924.075.621	98,85	4.924.075.621	14.829.325.242	2,90



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026 (periode Renstra SKPD)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	6.353.875	6.400.000	6.400.000	6.400.000	100,00	6.400.000	19.200.000	3,02
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	165.256.357	166.456.000	166.456.000	165.449.000	99,40	165.449.000	497.354.000	3,01
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.203.675.680	1.636.531.500	1.636.531.500	1.635.715.958	99,95	1.635.715.958	4.907.963.416	4,08
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	80.776.421	81.362.800	81.362.800	79.178.000	97,31	79.178.000	239.718.800	2,97
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.494.662	356.673.000	356.673.000	328.829.366	92,19	328.829.366	1.014.331.732	3,14



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026 (periode Renstra SKPD)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	154.658.292	159.681.000	159.681.000	159.616.899	99,96	159.616.899	478.914.798	3,10
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	3.938.409.972	4.667.000.000	4.667.000.000	4.522.786.876	96,91	4.522.786.876	13.712.573.752	3,48
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	3.938.409.972	4.667.000.000	4.667.000.000	4.522.786.876	96,91	4.522.786.876	13.712.573.752	3,48
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik 2. Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu	4.738.360.903	4.488.910.000	4.488.910.000	4.402.332.684	98,07	4.402.332.684	13.293.575.368	2,81



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026 (periode Renstra SKPD)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	1. Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	4.738.360.903	4.488.910.000	4.488.910.000	4.402.332.684	98,07	4.402.332.684	13.293.575.368	2,81
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	1.498.786.586	1.859.666.700	1.859.666.700	1.845.086.220	99,22	1.845.086.220	5.549.839.140	3,70



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026 (periode Renstra SKPD)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 3. Persentase PKK aktif 4. Persentase Posyandu aktif 5. Persentase Desa yang Melaksanakan PM TTG 6. Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDes yang aktif	1.498.786.586	1.859.666.700	1.859.666.700	1.845.086.220	99,22	1.845.086.220	5.549.839.140	3,70
JUMLAH			17.254.296.203	18.427.875.000	18.427.875.000	18.093.490.624	98,19	18.093.490.624	54.614.856.248	3,17



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasar dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang berorientasi pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan target capaian renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2022 adalah 100%.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2021-2026 serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Didalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan 2021-2026 untuk mewujudkan Misi 3, tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 serta 2 (dua) Sasaran strategis dengan indikator sasaran strategis sejumlah 4 (empat) indikator sasaran.

Capaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2021-2026 dalam implementasi dan kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sudah baik, namun belum optimalnya upaya pencapaian kinerja pada Tahun 2020, 2021 Tahun 2022 diakibatkan kondisi pandemi COVID-19 dengan adanya kebijakan refocusing anggaran penanganan COVID-19 serta kebijakan pembatasan sosial berskala besar/kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, capaian kinerja dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

No	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Cakupan sasaran prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	44.69	48.35	52,01	55,68	44,69	48.35	52,01	55,68	
2.	Persentase kerjasama pembangunan kawasan perdesaan yang terfasilitasi		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	55.56	66.67	77,78	88,89	55,56	66.67	77,78	88,89	
3.	Persentase desa yang memiliki administrasi Pemerintahan desa yang baik		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang Aktif		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	



No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Persentase BUMDes yang mampu meningkatkan omset usaha		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	3.66	5.49	7,33	9,16	3,66	3,66	7,33	9,16	
7.	Persentase laporan keuangan sesuai standar akuntansi publik		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase penilaian area manajemen risiko		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	



Pencapaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan sebagai perwujudan dari pelaksanaan mandat atas Misi 3 RPJMD 2021-2026 untuk : ***“Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing”*** serta mencapai Tujuan.

1. **Tujuan 1** : Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa.
 - (a) **Sasaran 1** : Meningkatnya status perkembangan desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM); indikator sasarannya :
 - (1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal, Target : 88,89 %
 - (2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri, Target : 0,92 %
2. **Tujuan 2** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, secara rinci dapat kami sajikan sebagai berikut:
 - (a) **Sasaran 2** : Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik; indikator sasarannya :
 - (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Target : Nilai B
 - (2) Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Target : Nilai B



Alokasi Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian SPM (%)	Anggaran	
			Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98,80	7.412.298.300,00	7.323.284.844,00
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	24.020.000,00	24.020.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	4.290.000,00	4.290.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100,00	6.660.000,00	6.660.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	5.145.000,00	5.145.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	7.925.000,00	7.925.000,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98,85	4.981.174.000,00	4.924.075.621,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	98,83	4.807.235.000,00	4.750.868.806,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99,55	162.974.000,00	162.241.815,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	10.965.000,00	10.965.000,00
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	6.400.000,00	6.400.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	6.400.000,00	6.400.000,00
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,40	166.456.000,00	165.449.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	98,32	59.082.000,00	58.090.000,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100,00	25.100.000,00	25.100.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99,95	30.000.000,00	29.985.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00	52.274.000,00	52.274.000,00
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.636.531.500,00	1.635.715.958,00



No	Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian SPM (%)	Anggaran	
			Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4	5
		99,95		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	7.495.000,00	7.495.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,85	158.280.000,00	158.040.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,59	65.883.500,00	65.614.200,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99,74	15.000.000,00	14.961.453,00
	Penyediaan Bahan/Material	99,84	136.523.000,00	136.302.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	1.253.350.000,00	1.253.303.305,00
6.	Pengadaan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	97,31	81.362.800,00	79.178.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97,19	75.687.800,00	73.563.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98,94	5.675.000,00	5.615.000,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	92,19	356.673.000,00	328.829.366,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97,11	162.565.000,00	157.862.500,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,02	105.000.000,00	86.118.866,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95,22	89.108.000,00	84.848.000,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,96	159.681.000,00	159.616.899,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	90.630.000,00	90.629.899,00
	Pemeliharaan Mebel	100,00	6.600.000,00	6.600.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00	14.550.000,00	14.550.000,00



No	Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian SPM (%)	Anggaran	
			Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,87	47.901.000,00	47.837.000,00
II	Program Peningkatan Kerjasama Desa	96,91	4.667.000.000,00	4.522.786.876,00
	1. Fasilitasi Kerjasama antar Desa	96,91	4.667.000.000,00	4.522.786.876,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	95,34	98.800.000,00	94.200.000,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	97,12	4.473.900.000,00	4.345.236.876,00
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	88,39	94.300.000,00	83.350.000,00
III	Program Administrasi Pemerintahan Desa	98,07	4.488.910.000,00	4.402.332.684,00
	1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	98,07	4.488.910.000,00	4.402.332.684,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	98,71	3.575.840.000,00	3.529.799.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	98,01	104.421.000,00	102.346.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	97,77	185.865.000,00	181.715.000,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	90,25	160.000.000,00	144.395.000,00
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	86,93	40.000.000,00	34.770.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	100,00	34.784.000,00	34.784.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	95,22	90.000.000,00	85.696.000,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	96,89	118.000.000,00	114.327.684,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	96,94	180.000.000,00	174.500.000,00
IV	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	99,22	1.859.666.700,00	1.845.086.220,00



No	Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian SPM (%)	Anggaran	
			Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4	5
	Masyarakat Hukum Adat			
	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	99,22	1.859.666.700,00	1.845.086.220,00
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	98,93	334.278.000,00	330.711.712,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	98,49	220.000.000,00	216.675.000,00
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	99,64	175.000.000,00	174.373.780,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	98,74	525.000.000,00	518.390.000,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	99,73	92.910.000,00	92.660.000,00
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100,00	37.960.700,00	37.960.700,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	99,96	474.518.000,00	474.315.028,00
	JUMLAH	98,19	18.427.875.000,00	18.093.490.624,00



Capaian Kinerja Sasaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB	SASARAN INDIKATOR PROGRAM/ SUB KEGIATAN	DAN KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2		3		4	5	6
I	Program	Penunjang	Urusan	Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100%	100%	100%
				Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	100%	100%	100%
				Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko	Level 1	Level 2	200%
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		100%	100%	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			Jumlah dokumen LKJIP tersusun		1 Dokumen	1 Dokumen	100%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2		3	4	5	6
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta penyelesaian Indikator Desa Membangun (IDM) dan laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	47 Orang	47 Orang	100%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
			Jumlah pengelola administrasi penyusunan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)	98 Orang	98 Orang	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	100%	100%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2		3	4	5	6
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	122 Stel	122 Stel	100%
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
			Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43 Dokumen	43 Dokumen	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
			Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Paket	12 Paket	100%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
			Jumlah peserta Bimbingan Teknis	61 Orang	61 Orang	100%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2		3	4	5	6
			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Komponen Listrik	15 Komponen Listrik	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	181 Unit	181 Unit	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Jenis Barang Cetak	12 Jenis Barang Cetak	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	192 Eksemplar	192 Eksemplar	100%
		Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material			



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2		3	4	5	6
			Jumlah Bahan/Material yang disediakan	50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138 Kali DL dan 225 Kali DD	138 Kali DL dan 225 Kali DD	100%
	6.	Pengadaan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	100%	100%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 Unit	5 Unit	100%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit	2 Unit	100%
	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2		3	4	5	6
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Jasa kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	11 Orang	11 Orang	100%
		Penyediaan Jasa Kamunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kamunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening Jasa	3 Rekening Jasa	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Orang	6 Orang	100%
	8.	Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	25 Unit	25 Unit	100%
		Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel			
			Jumlah Mebel terpelihara	25 Unit	25 Unit	100%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ KEGIATAN		SUB	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2			3	4	5	6
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi / terpelihara	4 Unit	4 Unit	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi / terpelihara	61 Unit	61 Unit	100%
II	Program Peningkatan Kerjasama Desa			Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	55,56%	55,56%	100%
	1.	Fasilitasi Kerjasama antar Desa		Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	33,33%	33,33%	100%
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			
				Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	1 Desa	1 Desa	100%
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			
				Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa dengan Pihak Ketiga	15 Desa	15 Desa	100%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ KEGIATAN		SUB	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2			3	4	5	6
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			
				Jumlah pembentukan kawasan perdesaan yang difasilitasi dan di monev	1 Regulasi	1 Regulasi	100%
III	Program Administrasi Pemerintahan Desa			Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%
				Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu	100%	100%	100%
	1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%
				Persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)	100%	100%	100%
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
				Jumlah desa yang difasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	273 Desa	273 Desa	100%
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
				Jumlah Aparatur Desa yang dilatih dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	273 Desa	273 Desa	100%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2		3	4	5	6
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
			Jumlah aparatur desa dan pendamping desa yang dilatih	273 Desa	273 Desa	100%
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
			Jumlah aparatur pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	273 Desa	273 Desa	100%
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
			Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	273 Desa	273 Desa	100%
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			
			Jumlah desa yang memperbarui data Profil Desa	273 Desa	273 Desa	100%
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			
			Jumlah fasilitasi pengelolaan aset desa	273 Desa	273 Desa	100%
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			
			Jumlah Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	273 Desa	273 Desa	100%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2		3	4	5	6
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
			Jumlah desa yang dievaluasi dan updating data Sistem Informasi Desa (SID)	273 Desa	273 Desa	100%
IV	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Tinggi	Tinggi	100%
			Persentase BUMDes yang Meningkatkan Omset Usaha	3,66%	3,66%	100%
	1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100%	100%	100%
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%
			Persentase PKK aktif	100%	100%	100%
			Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%
			Persentase Desa yang Melaksanakan PM TTG	1,47%	1,47%	100%
			Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDes yang aktif	100%	100%	100%
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penday agunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penday agunaan			



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2		3	4	5	6
		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam Penataan, Pemberdayaan dan didayagunakan	273 Lembaga	273 Lembaga	100%
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	273 Lembaga	273 Lembaga	100%
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,			



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5	6
			dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
			Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	273 Desa	273 Desa	100%
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
			Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	273 Desa	273 Desa	100%
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
			Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan dan pendayagunaan TTG	4 Kelompok	4 Kelompok	100%
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
			Jumlah Desa Penyelenggara Gotong Royong Masyarakat	273 Desa	273 Desa	100%
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK			



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB	SASARAN INDIKATOR PROGRAM/ SUB KEGIATAN	DAN KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA
1	2		3		4	5	6
		Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
			Jumlah Tim Penggerak PKK Desa yang difasilitasi		273 Desa	273 Desa	100%

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya pembangunan untuk mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dan desa, kemandirian dicerminkan dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dan desa dalam tata kelola pembangunan di desa, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia juga diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-kelembagaan kemasyarakatan di tingkat desa. Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan, maka dinamika pembangunan di desa semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud.

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub urusan, yaitu:

- 1) Penataan Desa, dengan kewenangan penyelenggaraan penataan Desa.
- 2) Kerja Sama Desa, dengan kewenangan Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 3) Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
- 4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kewenangan:



- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Masyarakat desa pada umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha kecil. Masalah yang sering mereka hadapi persoalan terbatasnya modal. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa-Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes-LKM) dibentuk dengan harapan dapat membantu warga dalam aksesibilitas permodalan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDes) selama lima tahun terakhir meningkat sangat signifikan, yaitu dari 9,16% tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2022.

Selain Badan Usaha Milik Desa-Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes-LKM), PKK menjadi wadah potensial motor penggerak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga, khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan. PKK aktif di Kabupaten Grobogan sudah mencapai 100%, namun Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK masih sebesar 73,99%. Perihal kesehatan masyarakat, PKK juga memberikan kontribusi penting dalam kesehatan masyarakat melalui Posyandu. Posyandu aktif di Kabupaten Grobogan sudah mencapai 100%. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LPMD/LPMK mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa



dan kelurahan telah dibentuk LPMD/ LPMK dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Pada setiap tahunnya LPMD/K dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan DPM DP3AP2KB Kab. Grobogan maupun program lainnya. Tugas dan fungsi dari LPM diatur dalam pasal 150 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, tugasnya adalah:

- a) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- c) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

- a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa.
- d) Menyusun rencana, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
- e) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat.
- f) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
- g) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. Namun LPM aktif Tahun 2022 masih mencapai 73,99%. Di Kabupaten Grobogan, Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) pada Tahun 2022 mencapai sebesar 73,99%.



Program pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha, serta diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi melalui swadaya di desa/kelurahannya masing-masing. Program pemberdayaan masyarakat merupakan stimulan atau perangsang saja untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ada di tangan masyarakat itu sendiri, masyarakat-lah yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan serta memelihara hasil kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap perencanaan, swadaya masyarakat dapat berupa tenaga, alat-alat dan uang. Dalam tahap pelaksanaan swadaya masyarakat berupa bahan/material, tenaga dan alat-alat. Sedangkan swadaya uang tidak ada. Dalam tahap pelestarian partisipasi masyarakat diwujudkan dengan kesanggupan masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan dengan swadaya tenaga. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Cakupan sarana prasarana desa kondisi baik di Kabupaten Grobogan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2022 terus meningkat tiap tahunnya, yaitu dari 33,33% menjadi 44,69%. Kondisi cakupan sarana prasarana desa di Kabupaten Grobogan perlu lebih dioptimalkan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi dan informasi, air bersih, sanitasi, energi, penerangan, peribadatan, dan sarana dan prasarana lainnya di Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa, terutama dalam menunjang keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat miskin dan termarginal di desa. Cakupan sarana prasarana desa ditunjukkan melalui Desa yang berprofil sebesar 100% dan perencanaan pembangunan dalam menunjang keberlangsungan kehidupan,



kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi seluruh penduduk desa dituangkan dalam RPJM Desa, dengan capaian seluruh desa telah menyusun RPJMDes.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan berkaitan dengan Analis isu-isu strategis yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
2. Belum optimalnya penataan pemerintahan desa;
3. Belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa;
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa;
5. Belum optimalnya peningkatan kerjasama dan pembangunan Kawasan perdesaan.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu Tahun 2024 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Grobogan.

Berikut ini adalah Tabel review rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2024 :



Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Grobogan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
I	PROGRAM PENATAAN DESA					I	PROGRAM PENATAAN DESA				
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Kab. Grobogan	52,01%	70,000,000,00			Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Kab. Grobogan	52,01%	70,000,000,00
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Grobogan	100%	70,000,000,00	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Grobogan	100%	70,000,000,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	Kab. Grobogan	77,78%	3,982,440,000,00	II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	Kab. Grobogan	77,78%	3,982,440,000,00
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Kab. Grobogan	66,67%	3,982,440,000,00	1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Kab. Grobogan	66,67%	3,982,440,000,00
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Kab. Grobogan	100%	4,724,980,000,00	III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Kab. Grobogan	100%	4,724,980,000,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu		100%				Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu		100%	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	Kab. Grobogan	100%	4,724,980,000,00	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	Kab. Grobogan	100%	4,724,980,000,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)	Kab. Grobogan	100%				Persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)	Kab. Grobogan	100%	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Kab. Grobogan	Tinggi	1,787,996,000,00	IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Kab. Grobogan	Tinggi	1,787,996,000,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	Kab. Grobogan	7,33%				Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	Kab. Grobogan	7,33%	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kab. Grobogan	100%	1,787,996,000,00	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kab. Grobogan	100%	1,787,996,000,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kab. Grobogan	100%				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kab. Grobogan	100%	
		Persentase PKK aktif	Kab. Grobogan	100%				Persentase PKK aktif	Kab. Grobogan	100%	
		Persentase Posyandu aktif	Kab. Grobogan	100%				Persentase Posyandu aktif	Kab. Grobogan	100%	
		Persentase Desa yang Melaksanakan PM TTG	Kab. Grobogan	2,20%				Persentase Desa yang Melaksanakan PM TTG	Kab. Grobogan	2,20%	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDes yang aktif	Kab. Grobogan	100%				Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDes yang aktif	Kab. Grobogan	100%	
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Kab. Grobogan	100%	7,105,278,764,00	V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Kab. Grobogan	100%	7,105,278,764,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	Kab. Grobogan	100%				Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	Kab. Grobogan	100%	
		Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko	Kab. Grobogan	Level 3				Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko	Kab. Grobogan	Level 3	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kab. Grobogan	100%	24,595,000,00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kab. Grobogan	100%	24,595,000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta penyelesaian Indikator Desa Membangun (IDM) dan laporan keuangan tepat waktu	Kab. Grobogan	100%	4,812,155,764,00	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta penyelesaian Indikator Desa Membangun (IDM) dan laporan keuangan tepat waktu	Kab. Grobogan	100%	4,812,155,764,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	Kab. Grobogan	100%	6,400,000,00	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	Kab. Grobogan	100%	6,400,000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Grobogan	100%	137,502,000,00	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Grobogan	100%	137,502,000,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	100%	1,385,202,000,00	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	100%	1,385,202,000,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Grobogan	100%	59,710,000,00	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Grobogan	100%	59,710,000,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	NO	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	100%	392,568,000,00	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	100%	392,568,000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Grobogan	100%	287,146,000,00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Grobogan	100%	287,146,000,00
	JUMLAH				17.670.694.764,00		JUMLAH				17.670.694.764,00



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota tersebut diperoleh melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan Forum dalam melaksanakan Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan bersama oleh seluruh unsur masyarakat, baik yang duduk dalam kelembagaan pemerintahan desa, LKD dan unsur masyarakat lainnya.

Bahwa usulan Program/ Kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang, mekanisme diawali dari penggalian gagasan dari Tingkat Dusun/ Lingkungan yang melibatkan Unsur Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan Program yang dibawa ke Forum Musrenbangdes. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala Prioritas usulan Tingkat Desa, selanjutnya ditunjuk Perwakilan dari masing-masing desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan merupakan skala Prioritas yang telas sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada. Usulan Program/ Kegiatan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Grobogan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	USULAN PAGU (Rp)
1	Pasar Desa	KEDUNGJATI	Tersedianya Sarana Prasarana	1 unit	5.000.000.000



NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	USULAN PAGU (Rp)
			Perekonomian Desa		
2	Pembangunan Pasar Desa jetis	KARANGAYUNG	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 Paket	1.200.000.000
3	Pembangunan Pasar Desa Telawah	KARANGAYUNG	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 Paket	600.000.000
4	Pemeliharaan Pasar Desa Sedadi	PENAWANGAN	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 Paket	500.000.000
5	Pembangunan Pasar Desa	PENAWANGAN	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 Unit	200.000.000
6	Pembangunan Kios Pasar Kliwon Jipang	PENAWANGAN	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 Paket	200.000.000
7	Renovasi Kios Pasar Desa Kluwan	PENAWANGAN	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	8 Kios 3x4 m	160.000.000
8	pembangunan kios pasar desa	PENAWANGAN	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 paket	1.000.000.000
9	Pengurugan Pasar Desa	PENAWANGAN	Tersedianya Sarana Prasarana	1 Paket	500.000.000



NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	USULAN PAGU (Rp)
			Perekonomian Desa		
10	Pembangunan Pasar Desa Madoh Bangsri	GEYER	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 paket	500.000.000
11	Rahabilitasi Kios Pasar Desa Pulokulon	PULOKULON	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 unit	800.000.000
12	Pembangunan Pasar Desa Karangharjo	PULOKULON	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 unit	1.500.000.000
13	Pembangunan Pasar Desa Ds. Sidorejo	PULOKULON	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 unit	800.000.000
14	Pembangunan Los dan Kios Pasar Desa Panunggalan	PULOKULON	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 unit	500.000.000
15	Pembangunan Pasar Desa Desa Sembungharjo	PULOKULON	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 unit	1.000.000.000
16	Pembangunan Kios Pasar Desa Pulokulon	PULOKULON	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 unit	1.000.000.000
17	Pembangunan Kios Pasar Desa Keyongan; Pasar Mranggen di Desa	GABUS	Tersedianya Sarana Prasarana	5 UNIT	500.000.000



NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	USULAN PAGU (Rp)
	Keyongan		Perekonomian Desa		
18	Rehabilitasi Kios Pasar Desa Sulursari	GABUS	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	10 unit	700.000.000
19	Kios Pasar Desa (Gedangan)	WIROSARI	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	10 unit	1.000.000.000
20	Pembangunan Pasar Desa dan Rehab Embung Jetak Untuk Objek Wisata dan Peningkatan Perekonomian Desa di Desa Plosorejo	TAWANGHARJO	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 Paket	3.000.000.000
21	Pembuatan Pasar Desa di Desa Pulongrambe	TAWANGHARJO	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 unit	1.500.000.000
22	Pembangunan Pasar Desa/Pasar Hewan (lanjutan)	GUBUG	Tersedianya Sarana Prasarana Perekonomian Desa	1 unit	200.000.000
23	Pertemuan Kader (makan dan snack)	GODONG	Tersedianya logistik pertemuan Kader	14 desa	56.445.000
24	Kelas Ibu hamil (makan siang)	GODONG	Tersedianya logistik	14 desa	21.280.000
25	Kelas Balita (makan siang)	GODONG	Tersedianya logistik	14 desa	15.960.000
26	PMT Gizi buruk	Masyarakat Ds. Werdoyo, Guyangan, Gundi,	Tercukupinya pemenuhan kebutuhan	5 desa	224.100.000



NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	USULAN PAGU (Rp)
		Sumberagung, Kemloko	Makanan Tambahan		
JUMLAH					22.677.785.000



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan kebijakan penyelenggaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga merujuk pada Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai tugas pokok dan fungsi dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan kemampuan aparat, dan kelembagaan masyarakat dan desa serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
3. Menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat.
4. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana, Sumber Daya Alam dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis masyarakat.
5. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif dan pengembangan jaringan berbasis pemberdayaan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Kerja Strategis Tahun 2021 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

a. Tujuan :

- (1) Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa.
- (2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Sasaran :

- (1) Meningkatnya status perkembangan desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Tujuan dan Sasaran perangkat daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan serta
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	Indeks Desa Membangun (IDM)			0,70
			Meningkatnya status perkembangan desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM)	Persentase Pengentasan desa tertinggal	18,18%
				Persentase	0,39%



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
				Peningkatan Status Desa Mandiri	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			B
		Nilai evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			BB
			Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B
				Nilai evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Kedudukan program/kegiatan Perangkat Daerah yang direncanakan merupakan implementasi program/kegiatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Program/kegiatan Perangkat Daerah diperlukan guna mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan program yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 untuk rencana kerja Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan 2021-2026; Menetapkan visi Kabupaten Grobogan “***Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya***” yang memuat lima misi Pemerintah Kabupaten Grobogan. Maka yang terkait langsung dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan adalah pada poin ke-3 “***Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing***”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Grobogan 2021-2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat



kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik



Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-government.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Grobogan, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan merumuskan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan mensinkronkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2024, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan melaksanakan misi yang ke 3 Dengan prioritas pembangunan yaitu **Menguatkan ekonomi**



masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu ***“Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing”***, maka urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta program pembangunan untuk mendukung misi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 90 Tahun 2019 **kegiatan** yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan adalah :

1. Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa,
 - b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.
2. Fasilitasi Kerja sama antar Desa, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota;
 - b. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota;
 - c. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.



3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
 - c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - g. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - h. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
 - i. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa;
 - j. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
 - k. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
 - l. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - m. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa;
 - n. Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa;
 - o. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:



- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - e. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - g. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;



- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 9. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Penyediaan Bahan/Material;



- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pengadaan Mebel;
 - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan Mebel;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;



d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya.

Guna Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2024,
maka dibutuhkan sumber dana. Dana yang dibutuhkan dijabarkan
dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 disajikan dalam Tabel sebagai berikut:



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Grobogan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Grobogan
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								17.770.694.764,00	18.921.226.000,00				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								17.770.694.764,00	18.921.226.000,00				
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								17.770.694.764,00	18.921.226.000,00				
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA								70.000.000,00	70.000.000,00				
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa								70.000.000,00	70.000.000,00				
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa													
						Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,01 %	50 Unit	100 %	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	50 Unit	70.000.000,00
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								3.982.440.000,00	3.982.440.000,00				
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								3.982.440.000,00	3.982.440.000,00				
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota													
						Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,78 %	1 Dokumen	66,67 %	98.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabup aten/Kota	1 Dokum en	98.800.000,00
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota													
						Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,78 %	12 Dokumen	66,67 %	3.773.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabup aten/Kota	12 Doku men	3.773.900.000,00
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan													
						Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,78 %	1 Dokumen	66,67 %	109.740.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pe mbangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokum en	109.740.000,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								4.824.980.000,00	5.724.980.000,00				
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								4.824.980.000,00	5.724.980.000,00				
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya Persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	273 Dokumen	100 % 100 %	3.502.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	273 Dokumen	3.502.980.000,00
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
						Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya Persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	273 Dokumen	100 % 100 %	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	273 Dokumen	120.000.000,00
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
						Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya Persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	273 Dokumen	100 % 100 %	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	273 Dokumen	180.000.000,00
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa													
						Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya Persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	273 Orang	100 % 100 %	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	273 Orang	450.000.000,00
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa													
						Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya Persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	273 Laporan	100 % 100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	273 Laporan	1.000.000.000,00
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa													
						Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya Persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	273 Dokumen	100 % 100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	273 Dokumen	40.000.000,00
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya Persentase desa yang memperbaiki data Sistem Informasi Desa (SID)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	273 Dokumen	100 % 100 %	132.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	273 Dokumen	132.000.000,00
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD													
						Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya Persentase desa yang memperbaiki data Sistem Informasi Desa (SID)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	273 Orang	100 % 100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	273 Orang	100.000.000,00
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
						Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya Persentase desa yang memperbaiki data Sistem Informasi Desa (SID)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	273 Dokumen	100 % 100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	273 Dokumen	200.000.000,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1.787.996.000,00	1.787.996.000,00				
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.787.996.000,00	1.787.996.000,00				
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
						Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Desa yang Melaksanakan PM TTG Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDes yang aktif Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tinggi Level 7,33 %	273 Lembaga	2,20 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.196.834.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	273 Lembaga	1.196.834.000,00
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang Melaksanakan PM TTG Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDes yang aktif Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tinggi Level 7,33 %	273 Unit	2,20 % 100 % 100 % 100 % 100 %	230.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana K elembagaan Lembaga Ke masyarakata n Desa/Kelur ahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/K elurahan dan Masyarakat Hukum Adat	273 Unit	230.000.000,00	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
					Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Desa yang Melaksanakan PM TTG Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDes yang aktif Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tinggi Level 7,33 %	273 Dokumen	2,20 % 100 % 100 % 100 % 100 %	230.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pen gembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan n Pendapatan Asli Desa	273 Dok umen	230.000.000,00	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
					Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Desa yang Melaksanakan PM TTG Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDes yang aktif Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tinggi Level 7,33 %	5 Laporan	2,20 % 100 % 100 % 100 % 100 %	92.910.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	92.910.000,00	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Desa yang Melaksanakan PM TTG Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDes yang aktif Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tinggi Level 7,33 %	273 Laporan	2,20 % 100 % 100 % 100 % 100 %	38.252.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	273 Laporan	38.252.000,00	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7.105.278.764,00			7.355.810.000,00			
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							24.595.000,00			24.595.000,00			
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Level 3 Level 100 %	2 Dokumen	100 %	4.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.350.000,00	
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Level 3 Level 100 %	2 Dokumen	100 %	6.765.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.765.000,00	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Level 3 Level 100 %	1 Laporan	100 %	5.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.400.000,00	
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Level 3 Level 100 %	2 Laporan	100 %	8.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.080.000,00	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.812.155.764,00	5.062.417.000,00					
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta penyelesaian Indikator Desa Membangun (IDM) dan laporan keuangan tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 Level 100 % 100 %	42 Orang/b ulan	100 %	4.801.105.764,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang /bulan	5.051.367.000,00
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta penyelesaian Indikator Desa Membangun (IDM) dan laporan keuangan tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 Level 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	11.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.050.000,00
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6.400.000,00	6.400.000,00					
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Level 3 Level 100 %	2 Laporan	100 %	6.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.400.000,00
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							137.502.000,00	137.502.000,00					
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 Level 100 % 100 %	68 Paket	100 %	29.924.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	29.924.000,00
2	13	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 Level 100 % 100 %	42 Dokumen	100 %	25.375.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42 Doku men	25.375.000,00	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
					Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 Level 100 % 100 %	6 Orang	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	30.000.000,00	
2	13	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
					Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 Level 100 % 100 %	125 Orang	100 %	52.203.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Pe rundang-Und angan	125 Orang	52.203.000,00	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.385.202.000,00				1.385.202.000,00		
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Level 3 Level 100 %	10 Paket	100 %	7.825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listr ik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7.825.000,00	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Level 3 Level 100 %	110 Paket	100 %	98.457.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket	98.457.000,00	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Level 3 Level 100 %	10 Paket	100 %	56.884.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	56.884.000,00
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Level 3 Level 100 %	145 Dokumen	100 %	15.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Und angan yang Disediakan	145 Dok umen	15.120.000,00
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material													
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Level 3 Level 100 %	38 Paket	100 %	114.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	38 Paket	114.800.000,00
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Level 3 Level 100 %	229 Laporan	100 %	1.092.116.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pen yelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229 Laporan	1.092.116.000,00
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								59.710.000,00		59.980.000,00			
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 Level 100 % 100 %	4 Unit	100 %	50.030.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.300.000,00
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 Level 100 % 100 %	1 Unit	100 %	9.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.680.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								392.568.000,00			392.568.000,00		
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 Level 100 % 100 %	16 Laporan	100 %	204.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan	204.040.000,00
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 Level 100 % 100 %	3 Laporan	100 %	105.688.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	105.688.000,00
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level 3 Level 100 % 100 %	5 Laporan	100 %	82.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	82.840.000,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								287.146.000,00			287.146.000,00		
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % Level 3 Level	25 Unit	100 %	227.365.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	227.365.000,00
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % Level 3 Level	25 Unit	100 %	6.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	6.600.000,00
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % Level 3 Level	4 Unit	100 %	18.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	4 Unit	18.350.000,00
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Persentase Penilaian Area Manajemen Risiko	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % Level 3 Level	61 Unit	100 %	34.831.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	61 Unit	34.831.000,00
TOTAL													17.770.694.764,00				18.921.226.000,00	



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah disesuaikan dengan Keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, serta Peraturan Bupati Grobogan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi



dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 untuk Tahun Anggaran 2024.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target-target Rencana Kerja (Renja) dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja dengan sebaik-baiknya;
1. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja ini dapat tercapai;
2. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan rencana kerja wajib berpedoman pada Rencana strategis;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana strategis (Renstra) secara berkala;



4. Keberhasilan pencapaian target yang tertuang dalam Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan diperlukan sinergitas dan dukungan dari stakeholder dan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Kabupaten Grobogan;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2024, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Purwodadi, 9 Januari 2023
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN GROBOGAN

ACHMAD HARYONO, S.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680305 199310 1 001